



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARYONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 766719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/192 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 189.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2019, HADIAH Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.852.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.852.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.